PELAKSANAAN PENGAWASAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO

ARTIKEL JURNAL

FEVI PONGOLIU
NIM. D02416094

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

PELAKSANAAN PENGAWASAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO

Fevi Pongoliu[1], Umar Sako Baderan[2], Widya Kurniati Mohi[3]
[123)]Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: fevi_pongoliu@gmail.com

ABSTRACT

The objective of research was to determine the supervisions implementation at Public Works and Spatial Planning office of Bone Bolango Regency. The method used qualitative approach with descriptive research. The result obtained that the supervision implementation of the public works and spatial planning office of Bone Bolango regency, generally not going well. This is seen in 3 supervision indicators, only one indicator has worked well. In the indicator of Establishing implementation standards, it was found that supervision was only carried out at the end of the implementation of work, then on the indicator Conducting an Assessment (evaluate), it was found that there was still a transfer of responsibility by PNS to Honorary staff. Meanwhile, indicators that have been running well are indicators of Taking corrective action, where it is found that if there is a deviation from work, repairs will be made or impose sanctions for existing deviations.

Keywords: Implementation, Supervision

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango secara umum belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator pengawasan, hanya ada satu indikator yang telah dijalankan dengan baik. Pada indikator Menetapkan standar pelaksanaan, ditemukan bahwa pengawasan hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya pada indikator Mengadakan Penilaian (*evaluate*), didapatkan bahwa masih adanya pengalihan tanggungjawab oleh PNS ke tenaga Honorer. Sedangkan untuk indikator yang telah berjalan dengan baik adalah indikator Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*), dimana ditemukan bahwa jika terjadi penyimpangan atas pekerjaan akan dilakukan perbaikan ataupun pemberian sanksi atas pernyimpangan yang ada.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pengawasan

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya akselerasi dalam berbagai aspek pembangunan, pemerintah dituntut secara optimal untuk dapat berperan serta berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang seutuhnya. Oleh karenanya pemerintah harus mampu dalam membentuk suatu organisasi publik yang secara utuh dan optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan dari bidangnya. Setiap unit organisasi yang dibetuk oleh pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah harus mampu melaksanakan tugas kepelayanan sesuai dengan tujuan,

sasaran serta fungsi dari organisasi yang dibentuk tersebut.

Salah satu organisasi yang adalah dan berfungsi dalam pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang fokus pada pelayanan penyediaan fasilitas publik secara fisik. Selain itu dinas ini bertugas lebih pada penyediaan fasilitas publik secara umum juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dengan harapan agar supaya pemerintah secara optimal memberikan ketersediaan fasilitas umum kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan pelayanan kepada masyarakat dalam aspek fisik.

Sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dilingkungan pemerintah daeran Bone Bolango, salah satu unit kerja yang terbentuk adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain telah dibentuk secara organisasional, pemerintah daerah juga telah memberikan uraian tugas ataupun tugas pokok serta fungs dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone Bolango tersebut. Sebagai unti yang bertanggungjawab pada aspek penyediaan saranan dan prasaran umum, maka Dinas PUPR memiliki tugas pokok yaitu sebagai pembantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain memiliki tugas, Dinas PUPR juga berfungsi dalam:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan, pengembangan serta Pengawasan di bidang Pekerjaan Umum; dan
d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya.

Salah satu kegiatan ataupun fungsi dalam ilmu manajemen adalah pengawasan. Tujuan dari adanya pengawasan adalah untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan tujuan, standar dan sasaran dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Olehnya, pengawasan menjadi hal yang penting dalam sebuah kegiatan organisasi. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka akan dapat menekan tingkat kesalahan dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan cara melakukan koreksi secara dini ataupun minimalisir atas kesalahan yang dilakukan dalam sebuah organisasi.

Menurut Manullang (2008:172), mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut yakni:

1) Menetapkan standar pelaksanaan
2) Mengadakan Penilaian(*evaluate*)
3) Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*)

Penelitian terkiat dengan pelaksanaan pengawasan di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rozak pada tahun 2014 dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Pengawasan Pembangunan Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga penelitian yang dilakukan oleh Robi Marwanaya pada tahun 2016 dengan judul penelitian Pengawasan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Namun demikian, penelitian ini secara substansif cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut. Dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada pelaksanaan pengawasan pekerjaan secara administratif yang dilakukan oleh para pegawai dalam hal ini ASN yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango, menyangkut dengan kegiatan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan para pegawai yang dilakukan oleh pimpinan, didapat bahwa pelaksanaan pengawasan yang kurang, dimana dapat dilihat dari beberapa hal terkait dengan pengawasan diantaranya: (1) penanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan tidak secara langsung melakukannya, sehingga yang terjadi di lapangan adalah bahwa para ASN yang harusnya melakukan tanggungjawabnya, digantikan oleh pegawai honorer. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN dimana ASN tersebut bertanggungjawab atas pekerjaannya tetapi pekerjaan itu lebih banyak dikerjakan oleh tenaga honorer, selanjutnya (2) pelaksanaan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai lebih banyak dilakukan pada akhir pelaksanaan pekerjaan. Hal ini terkait dengan kontrol yang dilakukan oleh pimpinan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, dimana kontrol yang dilakukan hanya pada saat pekerjaan selesai dilakukan yang seharusnya dilakukan sejak awal pekerjaan tersebut dikerjakan hingga selesainya pekerjaan tersebut dikerjakan.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menurut Bogdan dan Taylor, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:3).

Demikian pula menurut Sugiyono (2012:11), penelitian jenis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*indevenden*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah:

a. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas
b. Kepala Bidang/Seksi
c. Pegawai PNS
d. Pegawai Honorer

2) Sumber data sekunder

Data sekunder dalam hal ini merupakan pelengkap yang diambil dari sumber lain, artinya menggunakan sumber-sumber yang sebelumnya tidak ditetapkan tetapi diperlukan dalam permasalahan yang dibahas.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data, antara lain:

1) Observasi

Observasi, yaitu langkah ini ditempuh untuk mengetahui secara lebih detail dan jelas mengenai obyek yang akan diteliti, peneliti akan melakukan studi pengamatan secara mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan.

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan semua informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini. Dalam kegiatan wawancara ini, penulis akan menggunakan panduan atau pedoman wawancara sehingga dalam melakukan wawancara dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dilaksanakan secara berulang-ulang sampai diperoleh data yang meyakinkan tentang apa yang akan diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data dari sumber-sumber nonvisual yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan rekaman yang ada relevansinya dengan kebutuhan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini data yang dijaring berupa dokumen yaitu meliputi profil lokasi penelitian, data pegawai dan data sarana prasarana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Manullang (2008), mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut yakni:

1) Menetapkan standar pelaksanaan
2) Mengadakan Penilaian(*evaluate*), dan
3) Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*).

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Adanya

pelimpahan tanggungjawab oleh ASN ke honorer, dan 2) Pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan pada akhir pekerjaan

Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis dituangkan dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan teori yang disampaikan oleh Manullang (2008) tentang pengawasan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango. Pada bagian ini akan diuraikan analisis hasil penelitian dari data yang diperoleh. Pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan standar pelaksanaan

Dalam kaitannya menetapkan standar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango terkait dengan melaksanakan pengawasan dilihat atas aspek:

a. Adanya pembagian tugas kepada para pegawai secara jelas

   Adapun standar yang ditetapkan dalam melaksanakan pengawasan dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan pekerjaan yakni berdasarkan pendidikan, keahlian dan tentunya peraturan lain yang terkait dengan tanggungjawab dari seorang ASN.

   Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara terkait dengan pembagian tugas yang menjadi bagian dari standar pelaksanaan pengawasan didaptkan bahwa pembagian tugas telah berjalan dengan baik, dimana para pegawai diberikan tugas sesuai dengan tingkat pendidikan serta keahlian mereka, sehingga dalam bekerja para pegawai telah sesuai dengan tupoksinya.

b. Standar Waktu

   Standar waktu terkait dengan adanya jadwal atau waktu yang ditetapkan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan. Stanbdar waktu yang baik adalah stnadar yang terukur. Artinya pekerjaan itu dapat diukur kapan selesai dikerjakan sejak pekerjaan itu diberikan. Jika pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan maka standar yang ditentukan telah dijalankan dengan baik.

   Terkait dengan standar waktu ini, hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara didapatkan bahwa standar waktu pelaksanaan pengawasan telah berjalan dengan baik, dimana standar waktu yang ditetapkan bagi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan atas hasil pekerjaan tersebut.

c. Waktu Pengawasan

   Waktu pengawasan terkait dengan kapan pengawasan tersebut harus dilakukan. Dalam beberapa kajian teori bahwa pelaksanaan itu harus dilakukan pada saat pekerjaan itu dilakukan, pada masa pengerjaan dan pada akhir pekerjaan.

   Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara, terkait dengan tahapan pengawasan dalam pelaksanaan didapatkan

bahwa tahapan pengawasan hanya dilakukan pada akhir saja, sedangkan secara aturan bahwa pelaksanaan pengawasan itu harus dilakukan pada saat pekerjaan dimulai hingga selesainya pekerjaan tersebut.

2) Mengadakan Penilaian (*evaluate*)

Mengadakan penilaian terkait dengan tindakan dalam menilai dan mengukur apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah dilakukan. Apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan pedoman serta standar atau tidak. Dalam mengadakan penilaian hal yang dilihat terkait dengan:

a. Menilai kinerja pegawai

   Didalam menilai hasil kerja pegawai sangat ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya adalah apakah pegawai tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur atau tidak.

   Berdasarkan hasil penelitian yang didaptkan melalui wawancara, didapatkan bahwa penilaian kinerja pegawai telah dilakukan dengan baik, dimana proses penilaian yang dilakukan biasanya pada kesesuaian pekerjaan dengan hasil yang didapatkan. Artinya pegawai dianggap berkinerja tinggi jika mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Mengevaluasi kinerja pegawai

   Melakukan evaluasi atas kinerja pegawai sama halnya dengan pemberian penilaian kepada pegawai atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Dalam mengukur kinerja pehgawai tujuannya adalah mengetahui hasil kerja yang telah dilakukan oleh pegawai.

   Berdasarkan hasil penelitian melalaui proses wawancara terkait dengan evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ditemukan bahwa kegiatan ini telah berjalan dengan baik, dimana evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai didasari atas ketercapaian hasil pekerjaan tersebut. Sedangkan pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap saat, mingguan dan bulanan.

c. Mengamati pekerjaan pegawai

   Mengamati pekerjaan pegawai tentunya harus dilakukan oleh pimpinan langsung aga pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dalam mengamti pekerjaan pegawai yang menjadi fokus utamanya adalah apakah pegawai tersebut bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan atau tidak.

   Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara terkait dengan mengamati pekerjaan pegawai ditemukan bahwa adanya pelimpahan tanggungjawab dari ASN ke honorer di Dinas PUPR. Hal yang mendasari adanya pelimpahan tersebut karena adanya pekerjaan yang begitu banyak serta adanya kesibukan ASN sehingga membutuhkan tenaga honorer untuk membantunya.

3) Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*)

Terkait dengan mengadakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone

Bolango, lebih terkait dengan tindakan yang diambil dalam penyesuaian pekerjaan apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan tujuan yang ada. Dalam mengadakan tindakan perbaikan, ada 2 hal yang menjadi fokusnya yakni:

a. Memperbaiki apabila terjadi kesalahan dan memberi peringatan

   Didalam pelaksanaan pengawasan apabila terjadi kesalahan maka akan diberikan peringatan ataupun teguran bahkan akan berujung pada sanksi sebagaimana aturan dalam Undang-Undang kepegawaian.

   Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara terkait dengan tindakan yang dilakukan jika pekerjaan yang tidak sesuai, dapat disimpulkan bahwa akan ada teguran yang diberikan oleh pimpinan dan yang paling besar sanksinya adalah dengan pemindahan ke unit lain.

b. Memberikan sanksi/teguran atas penyimpangan

   Tindakan yang dilakukan apabila pegawai melakukan kesalakan dalam melaksanakan pekerjaan.

   Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara terkait dengan sanksi yang diberikan oleh pimpinan, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan mulai dari sanksi yang ringan, sedang dan berat. Adapaun sanksi ringan hanya berupa teguran dan yang paling berat adalah pemecatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini serta melihat yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal sebagaimana yang tertuang dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Adanya pelimpahan tanggungjawab oleh ASN ke honorer, dan 2) Pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan pada akhir pekerjaan.

Kedua hal tersebut terjawab dalam kajian yang dilakukan, dimana untuk poin pertama yakni: 1) Adanya pelimpahan tanggungjawab oleh ASN ke honorer. Permasalahan ini terjawab pada indikator Mengadakan Penilaian. Dimana hasil penelitian yang didapatkan bahwa adanya pelimpahan tanggungjawab dari ASN ke honorer di Dinas PUPR. Hal yang mendasari adanya pelimpahan tersebut karena adanya pekerjaan yang begitu banyak serta adanya kesibukan ASN sehingga membutuhkan tenaga honorer untuk membantunya.

Selanjutnya untuk masalah kedua yakni: 2) Pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan pada akhir pekerjaan. Permasalahan ini ditemukan atau terjawab pada indikator Mentapkan Standar Pelaksanaan. Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tahapan pengawasan hanya dilakukan pada akhir saja, sedangkan secara aturan bahwa pelaksanaan pengawasan itu harus dilakukan pada saat pekerjaan dimulai hingga selesainya pekerjaan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango secara umum belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator

pengawasan, hanya ada satu indikator yang telah dijalankan dengan baik. Adapun indikator yang belum berjalan dengan baik yakni: 1) Menetapkan standar pelaksanaan, dimana dalam indikator ini ditemukan bahwa pengawasan hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan pekerjaan dan 2) Mengadakan Penilaian (*evaluate*), dimana hasil yang didapatkan bahwa terdapat pengalihan tanggungjawab oleh ASN ke tenaga Honorer. Sedangkan indikator yang telah berjalan dengan baik adalah indikator: Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*), dimana indikator ini dilihat dari sisi memperbaiki jika terjadi kesalahan serta memberikan sanksi atas penyimpangan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

a. Perlu adanya perubahan paradigma bahwa pengawasan itu berlaku dari dimulainya pekerjaan, saat pekerjaan dilaksanakan serta setelah pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan;
b. Perlu lebih mengimplementasikan aturan-aturan yang berhubungan dengan pegawai honorer guna terciptanya kinerja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rozak (Jurnal, 2014). Analisis Efektivitas Pengawasan Pembangunan Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Manullang. 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2010, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Robi Marwanaya (Jurnal, 2016). Pengawasan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.